LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

TAHUN 2022

JL. SUNGAI PAKABATA , DESA BAMBALEMO KEC. PARIGI, KAB. PARIGI MOUTONG
SULAWESI TENGAH
TELP/FAX (0451) 2320883,EMAIL : pn_parigi@yahoo.co.id
Website : www.pn-parigi.go.id

Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin serta ridho Nya Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dengan memperhatikan uraian laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsioanl dan Staff Yang ada pada sub Bagian masing – masing pada Pengadilan Negeri Parigi Kelas II serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standart Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan – peraturan hukum dan perundang – undang yang berlaku.

Berdasarkan fakta – fakta laporan tiap bagian di kepaniteraan dan tiap sub di kesekretariatan, dengan itu dijadikan dasar sebagai pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporakan

Demikian, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri Parigi Kelas II ini dapat Mencerminkan Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II dan Bermanfaat bagi Masyarakat, Amin yaa Rabbal Aalamiin.

Parigi, 03 Januari 2023

Ketua

Yakobus Manu, S.H.

Daftar Isi

HALAMAN

Pengantar i

Daftar isi ii

BAB I Pendahuluan 1

BAB II A.Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II 5

A.Keadaan Perkara Tahun 2022 5

B.Penyelesaian Perkara 5

B1.Jumlah Sisa Perkara yang diputus 5

B2.Jumlah Sisa Perkara yang diputus Tepat Waktu 6

B3.Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum 6

B4.Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi 6

B5.Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi 6

C.Akreditasi Penjamin Mutu 7

C.1 Posbakum 7

C.2 Sidang Keliling 7

C.3 Perkara Prodeo 9

BAB III. Sumber Daya Manusia 10

A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/Golongan/Pendidikan 10

B. Mutasi 11

C. Promosi 12

D. Pensiun 13

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat 13

BAB IV. Pengelolaan Keuangan , Sarana dan Prasaranan dan Teknologi Informasi 15

A.Pengeloaan Keuangan 15

B.Pengelolaan Sarana dan Prasarana 16

C.Pengelolaan Teknologi Informasi 18

a. Implementasi E-Court 18

b. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara 18

BAB V. Peningkatan Pelayanan Publik 20

A. Akreditasi Penjamin Mutu 20

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 21

C.Innovasi Pelayanan Publik 21
BAB VI. Pengawasan 24
A.Internal 24
B.Evaluasi 26
BAB VII. Penutup 27
A. Kesimpulan 27
B. Rekomendasi 27

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan – perabaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelola anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manjemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposioanal.
5. Mengelola sarana dan prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorintentasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manjemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Infrormasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Negeri Parigi Kelas II berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan terdapat program prioritas, antara lain adalah :

1. **Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**
   a. Website Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

      Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 maka peda Pengadilan Negeri Parigi Kelas II juga telah membuat website PN parigi dengan alamat : www.pn-parigi.go.id dimana website tersebut memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat.

   b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

      SIPP di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II juga telah disinkronisasikan dengan website Pengadilan Negeri Parigi Kelas II, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di www.sipp.pn-parigi.go.id

   c. E-Court Mahkamahh Agung

      E-Court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filling (pendafatarm secara online),e-paymenet (pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).

2. **Program Penyelesaian Perkara**

   Pada tahun 2022 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II pada tahun 2022 Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II mengeluarkan kebijakan yaitu :

a. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan
b. Optimalisasi pelaksaaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calender
c. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
d. Mengimplementasikan administasi perkara secara elektronik (e-Court)
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.

3. Pengawasan Rutin/Reguler

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengaawas Bidang setiap bulan dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas. Selanjutnya laporan pengawasan di serahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.

B. VISI dan MISI

VISI Pengadilan Negeri Parigi Kelas II sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Negeri Parigi Kelas II juga sesuai dengan Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Parigi Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan stategis di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin komplek dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manejemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ditetapkan ini adalah :

1. Terciptanya fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,efektif dan berkeadilan
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsioanal dalam APBN
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manejemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya menajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil,transparan dan akuntabel.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A.KEADAAN PERKARA TAHUN 2022

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi
1	Gugatan	5	64	58	11	5	4	1	0	0
2	Permohonan	0	13	13	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	1	29	29	1	0	0	0	0	0
4	Pidana Biasa	30	196	196	30	13	10	0	0	0
5	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Lalu-Lintas	0	2330	2330	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Pidana Praperadilan	0	2	2	0	0	0	0	0	0

B.PENYELESAIAN PERKARA

B1.Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Putus	Sisa Perkara
1	Gugatan	5	58	11
2	Permohonan	0	13	0
3	Gugatan Sederhana	1	29	1
4	Pidana Biasa	30	196	30
5	Pidana Cepat	0	0	0
6	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0
7	Pidana Anak	0	0	0
8	Pidana Praperadilan	0	0	0

B2.Jumlah Sisa Perkara yang diputus tepat waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Gugatan	58
2	Permohonan	13
3	Gugatan Sederhana	29
4	Pidana Biasa	196
5	Pidana Cepat	0
6	Perkara Lalu-Lintas	2330
7	Pidana Anak	1
8	Pidana Praperadilan	2

B3.Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Gugatan	53
2	Pidana Biasa	183
3	Pidana Anak	

B4.Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Gugatan	16
2	Gugatan Sederhana	

B5.Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana Anak	0

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

C.1. POSBAKUM

Pos Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II, Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah melaksanakan Posbakum dengan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.19.200.000 dan target Volume output sebesar 215 jam layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.19.200.000 (100%) dengan capaian volume output sebesar 215 jam layanan.

Jumlah Pelayanan Posbakum Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Orang	Jam Layanan (Dalam Jam)	Ket
1	Januari	12 Pemohon	57 jam	
2	Februari	15 Pemohon	43 jam	
3	Maret	6 Pemohon	18 jam	
4	April	8 Pemohon	20 jam	
5	Mei	6 Pemohon	15 jam	
6	Juni	8 Pemohon	20 jam	
7	Juli	6 Pemohon	15 jam	
8	Agustus	10 Pemohon	25 jam	
9	September	0 Pemohon	0 jam	
10	Oktober	1 Pemohon	1 jam	
11	November	0 Pemohon	0 jam	
12	Desember	0 Pemohon	0 jam	
Total		**72 Pemohon**	**215 jam**	

C.2. SIDANG KELILING

Sidang Keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada msayarakat. Tujuan dilakukan sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal kauh dari Pengadilan Negeri sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana , cepat dan berbiaya ringan

Sidang Keliling Pidana Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Total		**0**

Sidang Keliling Perdata Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0

6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Total		**0**

C.3. PERKARA PRODEO

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Perdata Permohonan	0
2	Perdata Gugatan	0

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN /GOLONGAN/PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Karier	7
2	Pejabat Struktural	8
3	Panitera Pengganti	2
4	Jurusita	1
5	Jurusita Pengganti	1
6	Fungsional Prakom	2
7	Fungsional Arsiparis	1
8	Staff Pelaksana	6

SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan					Ket
		L	P	S3	S2	S1	D3	SMA	
1	Ketua	1	0	0	0	1	0	0	
2	Wakil Ketua	0	0	0	0	0	0	0	
3	Hakim	4	2	0	1	5	0	0	
4	Pejabat Struktural	5	3	0	0	8	0	0	
5	Panitera Pengganti	1	1	0	1	1	0	0	
6	Jurusita	0	1	0	0	0	1	0	
7	Jurusita Pengganti	1	0	0	0	1	0	0	
8	Fungsional Prakom	2	0	0	0	2	0	0	
9	Fungsional Arsiparis	0	1	0	0	0	1	0	
10	Staff Pelaksana	6	0	0	0	4	2	0	
Jumlah		20	6	0	1	22	4	0	

SDM BERDASARKAN GOLONGAN DAN RUANG

No	Jabatan	Golongan Dan Ruang															
		Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
4	Pejabat Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-
5	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
6	Jurusita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Fungsional Prakom	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
9	Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Staff Pelaksana	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-

A1.Mutasi

Mutasi Masuk

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Syahruddin, S.H.	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Luwuk	Panmud Perdata Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Mutasi Keluar

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Rosmaida Gultom	Panmud Perdata Pengadilan Negeri Parigi Kelas II	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sidikalang

B.Promosi

Promosi Jabatan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Bheli Isya Kurniawan Koloay, ST.	Staff PTIP Pengadilan Negeri Parigi Kelas II	Pranata Komputer Pengadilan Negeri Parigi Kelas II
2	Lina Oktavia, A. Md.A.P.	Staff Umum Keuangan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II	Arsiparis Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Promosi Pangkat

No	Nama	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	Ramadhana Heru Santoso, S.H.	Hakim	III/a	III/b
2	Riwandi, S.H.	Hakim	III/a	III/b
3	Venty Pratiwi, S.H.	Hakim	III/a	III/b
4	Angga Nugraha Agung, S.H.	Hakim	III/a	III/b
5	Maulana Shika Arjuna, S.H.	Hakim	III/a	III/b
6	Femila Sari, A.Md.	Jurusita	III/a	III/b
7	Fadly Orsay Pamora, S.H.	Jurusita Pengganti	III/a	III/b

Pensiun

No	Nama	Jabatan
1	-	-

Diklat

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1	Yakobus Manu, S.H	Ketua Pengadilan Negeri Parigi	Pelatihan online persidangan perkara pidana yang menghadirkan bukti elektronik
2	I Ketut Sueca, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Parigi	Bimtek Kepaniteraan Se-Wilayah Hukum PT Sulteng
3	Indorenung, S.T., S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi	Bimtek Keuangan, Perencananan dan anggaran, kepegawaian se Wilayah Hukum PT Sulteng
4	Muh. Taslim Thahir, S.H.	Panmud Hukum Pengadilan Negeri Parigi	Bimtek Perencanaan dan Anggaran Se Wilayah Hukum PT Sulteng
5	Darman, S.H., M.H.	Panmud Hukum Pengadilan Negeri Parigi	Bimtek Kepaniteraan Se-Wilayah Hukum PT Sulteng
6	Fadly Orsay Pamora, S.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi	Bimtek Kepaniteraan Se-Wilayah Hukum PT Sulteng
7	Abdul Muin, S.Kom	Kasub Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Negeri Parigi	Bimtek Perencanaan dan Anggaran Se Wilayah Hukum PT Sulteng
8	Fenny Kalyana Cendana, S.E.	Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Parigi	Bimtek Keuangan Se-Wilayah Hukum PT Sulteng
9	Visuddhatma Sankara, S.Kom	Pranata Komputer Pengadilan Negeri Parigi	Pelatihan Fungsional Prakom Tingkat Ahli

10	Bheli Isya Kurniawan Koloay, ST	Pranata Komputer Pengadilan Negeri Parigi	*E-Learning* Bendahara Pengeluaran Angkatan IV TA 2022
11	Lina Oktavia, A.Md. A.P.	Arsiparis Terampil	*E-Learning* Bendahara Penerima Angkatan II TA 2022
12	Sihar Walter Palmarum, S.H.	CPNS Pengadilan Negeri Parigi	*Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS*
13	Ryvanuel Juangsa Simbolon, S.H.	CPNS Pengadilan Negeri Parigi	*Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS*
14	Abednego, S.H.	CPNS Pengadilan Negeri Parigi	*Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS*
15	Rizka Aditya, A.Md.	CPNS Pengadilan Negeri Parigi	*Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS*
16	Septian Bayu Tri Widodo, A.Md.A.B.	CPNS Pengadilan Negeri Parigi	*Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS*

BAB IV

Pengelolaan Keuangan ,Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

DIPA 01(Badan Urusan Administrasi)

1.Belanja Pegawai

- Pagu : 2.894.891.000
- Realisasi : 2.868.759.797
- Sisa : 26.131.203
- Prosentase : 99.10 %

2.Belanja Barang

- Pagu : 1.463.158.000
- Realisasi : 1.428.801.116
- Sisa : 34.356.884
- Prosentase : 97.65 %

3.Belanja Modal

- Pagu : 505.773.000
- Realisasi : 505.450.000
- Sisa : 323.000
- Prosentase : 99,4 %

DIPA 03(Badan Peradilan Umum)

1.Penanganan Perkara

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Pagu : 78.784.000
- Realisasi : 77.867.820
- Sisa : 916.180
- Prosentase : 98.84%

Penerimaan Negera Bukan Pajak

PNBP DIPA 01

Diterima : - (tidak ada Penerimaan)

Disetorkan : -

Prosentase : -

PNBP DIPA 03

Diterima : 22.656.500

Disetorkan : 22.656.500

Prosentase : 100 %

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Berlokasi di jalan sungai Pakabata Desa Bambalemo Kec Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia

Data Aset Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 (Empat)
Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

No	Pemakai	Merk Kendaraan	Plat Nomor
1	Yakobus Manu, SH	Kijang Innova Type G	DN 203 K
2	Indorenung, SH	Rush Type G	DN 1439 K
3	I Ketut Sueca, SH	Avanza Type G	DN 1241 K

Data Aset Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 (Empat)

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

No	Pemakai	Merk Kendaraan	Plat Nomor
1	I Ketut Sueca, SH	Honda Type GL 15 B1DF	DN 4345 P
2	Abdul Kadir, SH	Honda Type NF 125 TR	DN 4426 K

DAYA TAMPUNG RUANG SIDANG

DATA RUANG SIDANG DI PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

No	Nama Ruang Sidang	Daya Tampung	Kondisi
1	Ruang Sidang Utama	60 Orang	Baik
2	Ruang Sidang Kedua	50 Orang	Baik
3	Ruang Sidang Anak	20 Orang	Baik

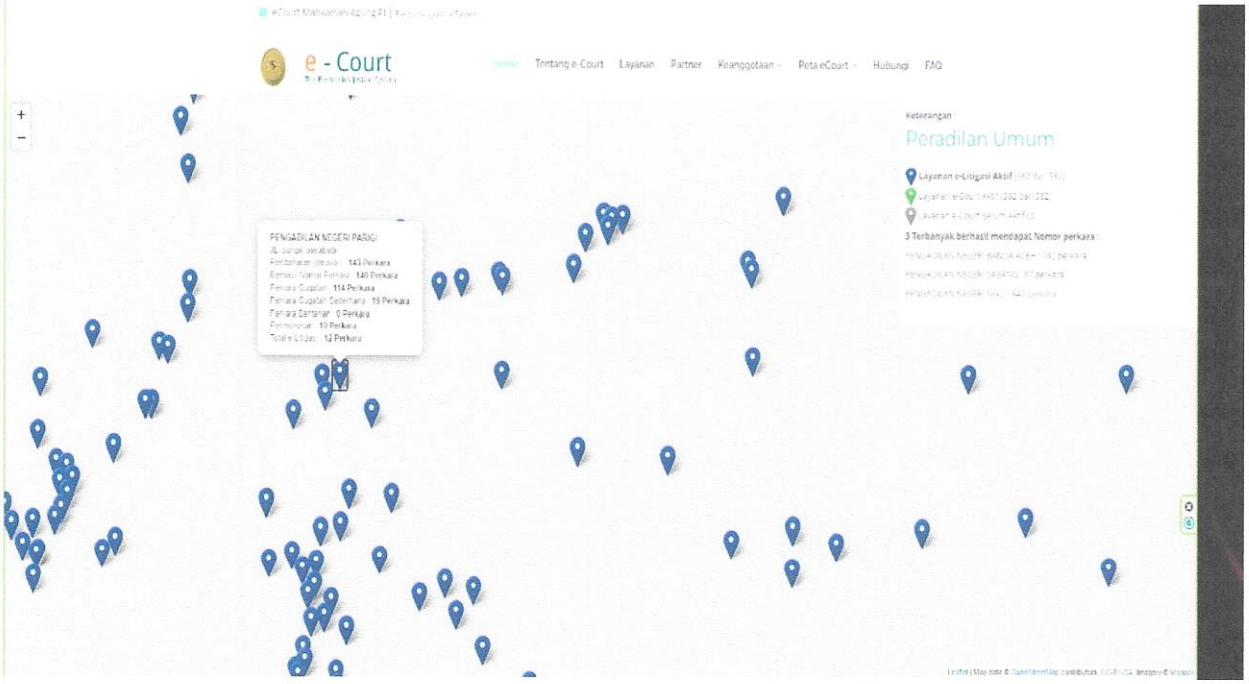
Komputer dan Internet

- **Jumlah Laptop = 11 Unit**
- **Jumlah komputer = 20 Unit**
- **Jumlah Server = 2 Unit**
- **Jumlah Printer = 30 Unit**
- **Scanner = 3 Unit**
- **Internet Pengadilan Negeri Parigi Kelas II menggunakan jaringan ICON + 15 Mbps Dedicated dan Indihome Upto 100 Mbps**

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Implementasi E-Court

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II pada Tahun 2022 telah menyediakan ruang pojok e-Court untuk para pencari keadilan mendaftarkan gugatan, permohonan, gugatan sederhana dan bantahan memalui fasilitas yang telah disediakan berupa komputer sejumlah 1 unit



b. Implementasi SIPP

SIPP Pengadilan Negeri Parigi Kelas II merupakan sarana pendukung administrasi perkara selalu melakukan update mengikuti versi terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan pada akhir Tahun 2022 SIPP yang telah terpasang di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II adalah 5.0.1



evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasi

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri

Kembali

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501~1000	II	Pengadilan Negeri Luwuk	141.25	549.51	101.95	187.25	979.96
2	1~500	II	Pengadilan Negeri TOLI-TOLI	149.37	535.07	102.00	185.74	972.18
3	1~500	II	Pengadilan Negeri Donggala	145.18	536.91	101.53	186.66	970.28
4	501~1000	IB	Pengadilan Negeri Poso	144.98	534.56	101.67	186.31	967.52
5	1~500	II	Pengadilan Negeri Parigi	146.08	541.36	93.92	182.94	964.30

PENCARIAN

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palu

Semua Kategori | Semua Kelas

Januari | 2022

Desember | 2022

CARI

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dengan nilai "A Excellent" pada Tahun 2021, memasuki penilaian Kembali Tahun 2022 Pengadilan Negeri Parigi Kelas II di berikan nilai "A".



Nomor : TAPM. 196 / QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Parigi Kelas II
Alamat : Jl. Sungai Pakabata, Parigi, Sulawesi Tengah
Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada :

I. Mei 2018
II. November 2018
III. Mei 2019
IV. November 2019
V. Mei 2020
VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
WAHYUDIN

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Dr. HERRI SWANTORO



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum

Nomor TAPM.366 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

PENGADILAN NEGERI PARIGI
KELAS II

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"B"

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

HIM HARYADI

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, Khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Dimana program Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah berlangusng sejak tahun 2018. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi Kelas II terus memacu kinerja semua aparatur untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja sehingga tetap mendapatkan penilaian "A Excelent".

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mulai dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II. Seluruh pelayanan publik dilakukan pada area PTSP Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.





Dimana di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II terdapat meja pelayanan sebagai berikut yaitu:

Loket 1: Loket Antrian Prioritas

Pada loket antrian prioritas ditujukan kepada masyarakat pencari keadilan yang termasuk dalam kategori kaum rentan dalam hal ini disabilitas, perempuan, dan anak.

Loket 2: Surat Masuk Sub Bagian Umum dan Keuangan

Meja umum melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi sub bagian umum dan keuangan. Pelayanan publik tersebut antara lain: pelayanan surat masuk, penerimaan tenaga magang/prakter kerja lapangan, dsb.

Loket 3: Informasi, pengaduan dan Kepaniteraan Hukum

Selain melayani informasi dan pengaduan meja ini juga melayani pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Hukum. Antara lain: pembuatan surat keterangan, pendaftaran surat kuasa kuasa.

Loket 4: Kepaniteraan Pidana

Meja pidana melayani pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Pidana. Pelayanan publik tersebut antara lain: pendaftaran perkara pidana, izin besuk tahanan, dsb.

Loket 5: Kepaniteraan Perdata

Meja perdata melayani pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan perdata. Pelayanan publik tersebut antara lain: pendaftaran perkara perdata permohonan, gugatan, dsb.

Loket 6: Kasir

Meja kasir melayani pembayaran dan pengembalian sisa panjar sehubungan dengan biaya selama proses persidangan.

Loket 7: E-Court

Meja E-Court sebagai layanan bagi pihak yang mau mengajukan baik gugatan, permohonan, maupun penetapan didaftarkan secara E-Court.

C.INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Selama Tahun 2022 Melakukan Inovasi Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu:

1. Penyebarluasan Informasi Mengenai Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

   Penyebarluasan informasi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum ini berisikan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum dan layanan informasi yang bisa dihubungi dalam hal ini Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Parigi Kelas II. Penyebarluasannya dilakukan melalui media cetak berupa poster yang disebarluaskan ke kecamatan yang ada di

Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, penyebarluasan informasi tersebut juga dilakukan pada website Pengadilan Negeri Parigi Kelas II dan Kanal YouTube Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.









2. Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Penyandang Sisabilitas Tuna Netra Melalui Pembuatan Formuli Gugatan Cerai Dengan Menggunakan Huruf Braile

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas tuna netra dalam pembuatan gugatan cerai dengan menggunakan huruf braile merupakan suatu inovasi meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dibidang percetakan huruf braile yang mempermudah kaum tuna netra, sehingga Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah dan terus berkomitmen dalam peningkatan layanan bagi kaum rentan pencari keadilan.



3. Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Menggunakan Video Panduan Bahasa Isyarat Tentang Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Pelayanan E-Court bagi penyandang disabilitas tuna rungu menggunakan video panduan bahasa isyarat tentang pendaftaran perkara secara elektronik merupakan bentuk dedikasi terhadap kaum rentan yang mau mendaftarkan perkaranya secara elektronik. Pelayanan ini ditujukan dalam peningkatan layanan bagi kaum rentan pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi penyebarluasan informasi melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.







4. Pengajuan Izin Besuk Bagi Tunawicara Pada Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Layanan Pengajuan Izin Besuk Bagi Tunawicara diimplementasikan dengan dibuatnya loket layanan prioritas serta penyebarluasan informasi dengan ditempelkan poster yang berisikan informasi izin besuk di kecamatan yang ada di Parigi Moutong.


PELAYANAN
Momposiolong
PENGADILA
LAYANAN PRIORITAS



BAB V
PENGAWASAN

A.Internal

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II sebagai Satuan Kerja tingkat pertama Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Sistem Organisasi Penyelenggara Pemerintahan diperlukan suatu pengawasan internal, sehingga ditunjuk Wakil Ketua sebagai Koordinator pengawas, dan Hakim sebagai pengawas internal pada bidang/bagian Pengadilan Negeri Parigi Kelas II yaitu sebagai berikut :

1. Kepaniteraan :
    - Kepaniteraan Muda Perdata
        - ❖ Ramadhana Heru Santoso, SH.
    - Kepaniteraan Muda Pidana
        - ❖ Riwandi,S.H
    - Kepaniteraan Muda Hukum
        - ❖ Iin Fatimah,SH, MH
2. Kesekretariatan :
    - SubBagian Keuangan dan Umum
        - ❖ Angga Nugraha Agung,SH
    - SubBagian Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana
        - ❖ Venti Pratiwi,SH
    - SubBagian Perencanaan,IT dan Pelaporan
        - ❖ Maulana Shika Arjuna,SH

Sesuai Buku 1 Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan,pembagian tugas Internal Meluputi :

1. Ketua , Melakukan pengawasan internal mengenai :
    a. Ketepatan waktu memulai persidangan
    b. Penyusunan court calender

c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.
d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan
e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang
f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang
g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas
h. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti,selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua,Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat struktural dan karyawan/ti yang dibuat secara berjenjang

2. Wakil ketua , melakukan pengawasan internal mengenai :
   a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dna realitasnya
   b. Pengisian register perkara secara tertip dan terus – menerus
   c. Penyampaian isi register oleh panitera muda sebagai bahan pembuatan laporan
   d. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum
   e. Pelaksanan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus , sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak,pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainya , agar benar-benar sampai kepada yang berhak
   h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah anatara keuangan perkara dan keuangan APBN
   i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertip perkantoran

3. Hakim,melakukan pengawasan internal meliputi :
    a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/ pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan.

B. Evaluasi

Evaluasi pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulan. Rapat rutin ini dihadari oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Parigi Kelas II







BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan laporan kajian hasil kerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2022 di atas, disimpulkan:

1. Aparatur Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan SOP dan Tupoksinya masing-masing dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja;
2. Masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Parigi Kelas II dalam melaksanakan tugas adalah :
   b. Jumlah Aparatur di Pengadilan Negeri Parigi Kelas II masih sangat kurang, perlu penambahan personil agar penataan / pembagian tugas dapat lebih terorganisir dan teratur;
   c. Pengadilan Negeri Parigi Kelas II masih kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi, diantaranya : Komputer/P.C, Laptop, Printer, AC, Jaringan PABX, Rumah Dinas, Jalan Kompleks, dll.
3. Dalam menangani perkara, Pengadilan Negeri Parigi Kelas II sedang berupaya untuk mengoptimalkan transparansi penanganan perkara dengan memanfaatkan Teknologi Informasi seperti Aplikasi SIPP dan upload putusan, agar masyarakat umum dapat mengakses informasi perkara secara *real time*;
4. Pengadilan Negeri Parigi Kelas II masih menata sarana dan prasarana untuk memberikan layanan terbaik bagi masyaratkat untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Sekarang ini Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah tersedia meja informasi, meja pengaduan dan papan informasi perkara serta layanan online publikasi perkara pada Aplikasi SIPP. Layanan publik tersebut belum maksimal karena keterbatasan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan laporan kajian hasil kerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2022 di atas, Pengadilan Negeri Parigi Kelas II merekomendasikan :

1. Perlunya upaya peningkatkan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna menghasilkan tenaga dan profesional dalam bidangnya
2. Perlunya penambahan pegawai karena pegawai yang ada saat ini masih belum memadai

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahun 2022, Kami sampaikan. semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam pembangunan di bidang Hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kabupaten Parigi Moutong Khususnya dan di Indonesia pada umumnya.